

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan secara sistematis untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Salah satu program pembinaan yang telah dan sedang dilakukan adalah program pendidikan kedinasan yang sudah dirintis sejak 1952 saat Kementerian PUPR bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL). Saat itu didirikan Lembaga Akademi Pendidikan Teknik (LAPT) untuk mendidik insinyur dan tenaga teknik sebagai akibat *exodus* tenaga teknik Belanda pasca kemerdekaan 1945 (Kepmen PUTL No. 118/34/13, 26-9-1952). Sejak saat itu pendidikan kedinasan “timbul-tenggelam” baik diselenggarakan sendiri ataupun diselenggarakan bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi mitra misal dengan ITB, UNDIP dan ITS. Pada saat itu diselenggarakan program Lembaga Pendidikan Pekerjaan Umum/LPPU (1978-1987). Tujuan beasiswa pendidikan kedinasan ini menurut Permen PU No. 13/PRT/M/2014 adalah : a) meningkatkan kapasitas SDM Aparatur di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil. Namun demikian belum ada penelitian yang intensif atau mendalam tentang program ini di lingkungan Kementerian PUPR sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan program pendidikan kedinasan tersebut. Pada 2015 dilakukan penelitian oleh konsultan tertentu terhadap enam prodi pada beberapa Perguruan Tinggi Mitra yang berada dalam lingkungan binaan atau tugas Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Hasil penelitian lebih merupakan kumpulan daftar mata kuliah yang diajarkan dan kurang mengelaborasi outcomes atau ketrampilan teknik yang diperoleh karya siswa. Hasil penelitian tersebut akan dibahas pada Bab II. Secara umum penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas dari program beasiswa pendidikan kedinasan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. **Evaluasi program akan mempergunakan model evaluasi CIPP dan *summative evaluation* (Stufflebeam & Zhang, 2017).**

Temuan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan *improvement* bagi pelaksanaan program mendatang.

Beasiswa atau *scholarship* merupakan pemberian (Lahinta, 2009) atau penghargaan (Murniasih, 2009) berupa bantuan keuangan kepada perorangan bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Arti kedua dari *scholarship* adalah keserjanaan atau “*a serious study of an academic subject*” (*Oxford Dictionary*). Beasiswa yang dipakai pada disertasi ini adalah pengertian yang pertama. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga, pemerintah ataupun yayasan. Tujuan pemberian beasiswa secara makro adalah upaya meningkatkan Human Development Index (HDI) (T.A. Ngasuko, 2015). HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di dunia. Ia juga dapat digunakan sebagai indikator apakah suatu negara masuk sebagai negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Saat ini menurut HDI (2018) posisi Indonesia ada dibawah Singapore (rangking 9), Malaysia (rangking 57), Thailand (rangking 83), Philippina (rangking 113) dan di atas Vietnam (rangking 116). Masalah beasiswa di Indonesia timbul antara lain diakibatkan oleh ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (PT) pasal 74 ayat (1) dan (2) yang mengatur agar PT aktif mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi secara ekonomi kurang mampu. Namun dari literatur bisa dipelajari berbagai masalah beasiswa sebagai pelaksanaan peraturan tersebut pada umumnya meliputi masalah ketidakadilan distribusi beasiswa yang sering jatuh kepada individu yang mampu serta diperlukannya transparansi proses administrasi pemberian beasiswa (D. Lestari, 2017).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai institusi non kementerian ataupun kementerian memfasilitasi beasiswa untuk mengikuti pendidikan tinggi bagi aparatur sipil negara (ASN). Beasiswa diperuntukkan untuk mengikuti program diploma, magister dan doktor, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. Saat ini salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang relatif dominan menyalurkan beasiswa adalah LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Lembaga ini memberikan fasilitas beasiswa pendidikan magister/doktor, pendanaan riset komersial/implementatif serta rehabilitasi

fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam (Lpdp.kemenkeu.go.id). Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagai salah satu lembaga kementerian dalam jajaran pemerintah juga memberikan beasiswa bagi para ASN yang bekerja di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian PUPR sebagai salah satu kementerian pemerintah RI mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Peraturan Menteri PUPR, No.15/PRT/M/2015). Tugas pokok tersebut adalah : a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur; b) koordinasi, pembinaan teknis, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan pelaksanaan tugas; c) penyusunan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan infrastruktur; d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan; e) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; f) dukungan yang bersifat substantif bagi seluruh jajaran organisasi di lingkungan Kementerian PUPR (Peraturan Menteri PUPR, No. 15/PRT/M/2015).

Tugas yang sedemikian luas tersebut menyangkut pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan penelitian serta pengembangan membutuhkan SDM yang handal. Menurut data per September 2016 jumlah pegawai Kementerian PUPR sebesar 23.074 orang, yang berpendidikan S3/S2 sebanyak 14%, S1/Diploma (40%), SLTA (36%), SLTP (10%) dan SD (10%). Melihat tugas ke depan kementerian yang akan menitikberatkan kepada fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Maka struktur pegawai yang berpendidikan S3/S2 yang masih rendah kiranya perlu ditingkatkan (misalnya menjadi 30% sampai 40% dalam jangka waktu 5 tahun). Kementerian PUPR dalam mendukung tugasnya berupaya mengembangkan sumber daya manusianya agar mempunyai integritas, kompeten, inovatif, profesional dan visioner dalam pembangunan (Hadimuljono, 2017). Kementerian PUPR juga mengelola beasiswa bagi pegawainya dan pegawai daerah yang bekerja pada bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Beasiswa diberikan dalam kerangka pendidikan kedinasan yang dilaksanakan bekerjasama dengan perguruan tinggi (Peraturan Pemerintah RI No. 14/2010). Pemberian beasiswa diperuntukkan bagi pegawai Kementerian PUPR dan juga pegawai daerah yang bekerja dibidang infrastruktur dengan

kualifikasi akademik yang tinggi dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan beasiswa kedinasan ini memerlukan kajian mendalam untuk mengatasinya. Permasalahan pertama adalah bahwa program beasiswa kedinasan yang perdefinisi menurut UU No. 20/2003 tentang Sistim Pendidikan; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum adalah pendidikan profesi yang dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra namun dalam pelaksanaannya belum mengikuti ketentuan yang berlaku. Contohnya bahwa setiap Karya Siswa belum atau tidak melakukan test sertifikasi keahlian pada akhir studi (**wawancara dengan Kasubag Kerjasama, Bagian Perencanaan & Evaluasi, Sekretariat BPSDM, 2018**). Karenanya perlu dievaluasi apakah perencanaan pendidikan kedinasan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan kedua adalah belum efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi menyangkut masalah laporan akademis karya siswa ke pusdiklat terkait. Sebetulnya sudah disediakan e-karyasiswa sehingga secara online karya siswa dapat mengunduh laporannya untuk disampaikan ke pusdiklat masing-masing. Namun karena sangsi belum diterapkan maka monitoring dan evaluasi terhadap laporan akademis karya siswa belum berjalan (**wawancara dengan Kasubid Evaluasi Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2018**). Namun demikian monitoring dan evaluasi yang lebih luas secara periodik dilakukan. Pada setiap akhir semester prodi mengirimkan laporan evaluasi pelaksanaan beasiswa menyangkut jumlah mahasiswa, kehadiran mahasiswa, IPK, kehadiran dosen, kondisi fasilitas sarana dan prasarana serta informasi terkait lainnya. Kemudian setahun sekali Pusdiklat terkait melakukan forum evaluasi bersama prodi mitra untuk menilai progres program dan permasalahan yang terjadi. Pertemuan evaluasi menyangkut masalah bimbingan dan konseling juga dilakukan secara terpisah setahun sekali. Menurut petugas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) sudah diatur dalam Standart Operasional Prosedur (SOP), sementara untuk masalah bimbingan dan konseling belum diatur dalam SOP (**wawancara dengan Kasubid Evaluasi Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2018**).

Permasalahan ketiga adalah belum diketahuinya hasil pencapaian tujuan program beasiswa di Kementerian PUPR yang menyangkut hasil dan manfaat program beasiswa bagi organisasi. Walaupun demikian evaluasi yang dilakukan dalam moneyv tiap tahun serta hasil penelitian pasca pendidikan yang pernah dilakukan oleh konsultan dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini. Penjelasan detail tentang penelitian yang relevan yang telah dilakukan akan dijelaskan pada Bab II.

Seperti disebutkan sebelumnya, evaluasi terhadap program beasiswa pendidikan kedinasan ini akan mempergunakan kerangka evaluasi Model CIPP (Stufflebeam & Zhang, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative dengan *generalisasi* yang terbatas, namun diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi perbaikan kebijakan tentang beasiswa tersebut khususnya pada Kementerian PUPR. Model evaluasi yang akan diterapkan adalah model CIPP yang digabung dengan model evaluasi summative (Stufflebeam & Zhang, 2017). Scope atau context penelitian adalah objek tertentu yang diteliti (misalnya group/populasi, tempat, waktu, organisasi) (Neuman, 2014). *Context* penelitian ini adalah evaluasi yang dibatasi yaitu terhadap program beasiswa Pendidikan Kedinasan Kementerian PUPR yang dilakukan pada kurun waktu 2013-2015. Pada kurun tersebut relatif semua prodi pada tingkat magister menyelenggarakan program perkuliahannya. Namun demikian beberapa prodi tidak dibuka pada tahun tertentu. Data prodi pada program 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Purposive sample akan dibatasi atau dipilih yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian. Partisipan yang dipilih adalah penerima beasiswa angkatan 2014. Dari duabelas perguruan tinggi mitra yang bekerjasama akan dipilih enam buah sebagai purposive samples yaitu UNDIP (1 prodi), UGM (2 prodi), ITS (1 prodi), UNPAD (1 prodi), UNPAR (1 prodi) dan UNHAS (1 prodi). Saat ini lulusan dari alumni minimal sudah tiga sampai lima tahun sejak selesai dari masa studinya dan sudah berada di lapangan pekerjaan. Manfaat study diharapkan akan bisa diketahui melalui penelitian terhadap alumni tersebut.

Terdapat tiga penelitian sebelumnya yang relative relevant untuk dikaji dalam proposal penelitian ini. Yang pertama penelitian pada 2015 yang dilakukan

oleh konsultan PT Prismaita Cipta Kreasi terhadap enam prodi di lingkungan Pusdiklat Tiga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak penyelenggaraan program pendidikan kedinasan dan vokasi di lingkungan Kementerian PUPR terhadap peserta program dan bagi unit kerja (organisasi). Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif. Partisipan adalah para alumni angkatan 2010- 2015. Hasil penelitian menyatakan bahwa program pendidikan kedinasan dan vokasi yang dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra memberikan dampak positif terhadap individu peserta program dan bagi unit kerja (organisasi) (*Laporan Akhir Evaluasi Pasca Pendidikan Kedinasan dan Vokasi TA 2015.*, 2015).

Penelitian kedua berbentuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan setahun sekali pada masing-masing Pusdiklat di lingkungan BPSDM. Dalam kaitan ini dipilih monev yang dilakukan di Pusdiklat Tiga pada 2017. Tujuannya adalah 1) monev tentang penyelenggaraan pendidikan kedinasan, 2) mengukur tingkat keberhasilan program, 3) masukan tentang dampak program terhadap kinerja individu peserta dan organisasi, 4) untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kedinasan, 5) bagaimana mengembangkan program pendidikan kedinasan. Metode yang dipakai adalah deskriptif menggunakan kuesioner yang hasilnya diolah atau dihitung dengan sistem Weight Mean Score (WMS). Partisipannya adalah karya siswa, dosen dan penyelenggara program studi. Hasil penelitian monev adalah 1) program kerjasama Pendidikan Kedinasan secara umum sudah berjalan dengan baik, 2) untuk karya siswa yang mengambil prodi dan tidak sesuai dengan tugas atau jabatan yang diemban, akan direkomendasikan untuk dipindahkan sesuai dengan bidang studi yang diambil dan atau sesuai dengan bidang atau judul tesis.

Penelitian ketiga adalah yang dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh (Hawignyo,2014) yang berjudul Evaluasi Program Beasiswa Unggulan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tujuan beasiswa, mekanisme seleksi peserta, proses distribusi dana beasiswa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta efektifitas program. Partisipan adalah pegawai pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud dan universitas penyelenggara. Metode penelitian yang

dipergunakan adalah CIPP Model. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1) dasar hukum yang digunakan sudah kuat dan telah terlihat hasilnya, 2) mekanisme seleksi di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri perlu diperbaiki, 3) proses penyaluran beasiswa banyak mengalami kendala terutama di awal tahun anggaran, 4) monev pelaksanaan program belum maksimal karena keterbatasan anggaran, 5) efektifitas program sudah bisa dirasakan oleh alumni.

Kegiatan yang dilakukan dalam program beasiswa di Kementerian PUPR yaitu pendidikan kedinasan dan vokasi. Namun disertasi ini hanya akan meneliti proses kegiatan pendidikan kedinasan saja. Di dalam kegiatan pendidikan kedinasan tersebut terdapat aktifitas antara lain meliputi : rekrutmen dan seleksi, penempatan karya siswa pada perguruan tinggi, proses pembelajaran, pembinaan Karya Siswa, monitoring dan evaluasi (monev), bimbingan dan konseling, penyerahan ke unit organisasi pengutus jika peserta selesai studi dan kompetensi lulusan serta pencapaian kompetensi seperti yang dibutuhkan di Kementerian PUPR. Namun tidak semua aspek akan diteliti dalam penelitian ini. **Penelitian akan focus dalam mengevaluasi: rekrutmen dan seleksi, proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pembinaan Karya Siswa, pelaksanaan monev dan bimbingan konseling, kompetensi lulusan serta pencapaian kompetensi seperti yang dibutuhkan di Kementerian PUPR.**

Demikian pemaparan tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latarbelakang, urgensi dilakukannya penelitian, permasalahan yang dihadapi, penelitian yang pernah dilakukan serta manfaat yang akan diperoleh dari upaya penelitian yang akan dilakukan. Program beasiswa pendidikan kedinasan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah salah satu upaya dalam kegiatan Human Resource Management yang dilakukan organisasi melalui pendidikan sebagai bagian dari pengembangan/*development* pegawai.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian secara umum adalah evaluasi terhadap program beasiswa pendidikan kedinasan di Kementerian PUPR dengan mempergunakan model evaluasi CIPP dan *summative evaluation*. Fokus penelitian tersebut akan dijabarkan dengan mengevaluasi terhadap :

- 1) Evaluasi dimensi *Context* :
 - a. Latar belakang program pendidikan kedinasan.
 - b. Visi, misi dan tujuan program,
- 2) Evaluasi dimensi *Input* :
 - a. Perencanaan program pendidikan kedinasan yang dilakukan apakah sesuai dengan kebijakan atau perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Perencanaan kurikulum apakah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangan yang terkait.
 - c. Perencanaan pembinaan karya siswa.
- 3) Evaluasi dimensi *Process* :
 - a. Rekrutmen dan seleksi.
 - b. Kesesuaian metode pembelajaran dan faktor pendukung lainnya dengan perencanaan yang ditentukan.
 - c. Monitoring dan evaluasi di tingkat Pusdiklat BPSDM.
- 4) Evaluasi dimensi *Product* :
 - a. Ketepatan penerima program.
 - b. Kompetensi Lulusan
 - c. Bagaimana pencapaian kompetensi sesuai yang diharapkan oleh Kementerian PUPR?

Fokus penelitian dengan demikian dapat dijelaskan untuk mengevaluasi program dengan kerangka evaluasi meliputi dimensi *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*. Pada dimensi *Context* akan dievaluasi latar belakang, visi/misi dan tujuan program. Pada dimensi *Input* dievaluasi perencanaan program pendidikan kedinasan, perencanaan kurikulum, perencanaan pembinaan karya siswa. Dimensi *Process* akan menilai pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, pelaksanaan pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi (monev). Dalam evaluasi *Product* akan dievaluasi ketepatan penerima manfaat, kompetensi lulusan serta bagaimana pencapaian kompetensi sebagaimana diharapkan oleh Kementerian PUPR.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang diuraikan di atas maka akan dirumuskan penjabaran fokus permasalahan sebagai rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1) Dimensi Context :

1.1. Bagaimana kesesuaian latar belakang, visi/misi/ tujuan program dengan prioritas kebutuhan tenaga profesional serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?.

2) Dimensi Input :

2.1. Bagaimana kesesuaian antara perencanaan pendidikan kedinasan, kurikulum dan pembinaan karya siswa yang dilakukan dengan kebutuhan pengembangan SDM, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3) Dimensi Process :

3.1. Bagaimana pelaksanaan program khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi, pelaksanaan pembelajaran dan factor pendukung lainnya, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan Pusdiklat BPSDM ?.

4) Dimensi Product :

4.1. Bagaimana ketepatan penerima program, kompetensi lulusan sebagai hasil belajar serta pencapaian kompetensi sesuai dengan yang diharapkan Kementerian PUPR?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan penting bagi keberlanjutan program sebagai perbaikan atau "*improvement*" terhadap kebijakan beasiswa tersebut. Di sisi lain diharapkan dapat memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari program beasiswa tersebut. Temuan penelitian kiranya juga akan bermanfaat bagi perkembangan teori terkait dengan Human Resource Management. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan oleh pakar bahwa setiap penelitian dari disertasi diharapkan dapat memberikan "*new knowledge*" dan merupakan originalitas dalam bidangnya (The Canadian Association for Graduate Studies, 2016). Merupakan pengetahuan baru jika memberikan kontribusi terhadap khasanah pengetahuan secara umum, bisa disebarkan, dapat diuji dan dikritik. Mempunyai originalitas sebagai kualitas yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman baru dalam topik, metode, perencanaan desain, sintesis teori

atau keterkaitannya dengan isu konseptual. Juga berisikan inovasi, spekulasi, rekonstruksi *imaginative* dan *cognitive excitement* atau rangsangan kognitive.

Demikian seperti diuraikan di atas, manfaat penelitian diharapkan akan bernilai bagi berbagai pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders*. Para pihak yang berkepentingan dengan program meliputi perencana program termasuk penentu kebijakan seperti pimpinan BPSDM. Unit organisasi sebagai pengguna hasil program di Kementerian PUPR juga akan mengambil manfaat. Unit organisasi adalah unit kerja setingkat eselon I (Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan) yang juga membawahi unit kerja setingkat eselon II, III dan IV. Unit kerja di luar jabatan struktural tersebut adalah satuan kerja atau Satker yang merupakan unit pelaksana terkecil sesuai dengan proyek/program yang ditanganinya. Unit perencana program juga terdapat di program studi (prodi) dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan. Pemangku kepentingan sebagai pelaksana kegiatan juga diharapkan dapat memanfaatkan hasil studi. Pelaksana kegiatan bisa dari lingkungan BPSDM beserta jajaran di bawahnya (Kapusdiklat, Kepala Bidang, Kabalai dan Kepala Seksi). Organisasi lain yang menangani Human Resource Management di luar BPSDM yaitu Biro Kepegawaian juga diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini. Terlepas dari manfaat praktis, hasil penelitian kiranya bisa berguna bagi perkembangan teori *Human Resource Management*.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini dari tataran makro akan bersifat menyeluruh atau komprehensif terhadap program pendidikan kedinasan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan serta hasil belajar serta pencapaian kompetensi dari sisi

kebutuhan di Kementerian PUPR. Beberapa alasan kebaruan penelitian ini dapat disebut antara lain adalah merupakan penelitian ilmiah pertama yang membahas evaluasi program kedinasan secara komprehensif di Kementerian PUPR. Terdapat penelitian sebelumnya oleh pihak konsultan namun hanya terhadap beberapa prodi dan mencakup beberapa aspek saja. Alasan kedua adalah hasil penelitian ini merupakan penelitian yang membahas topik pengembangan SDM. Penelitian lain yang ditelusuri dalam hal scholarship/beasiswa membahas aspek yang berlainan dengan aspek penelitian ini. Contoh penelitian tersebut

adalah 1) tentang **Aspek ketenagakerjaan** atau *Employment of Alumni* (Campbell,2017), 2) **Aspek skema beasiswa** atau *Scholarship Schema* (Bedi , Gole , Dhiman, & Gupta , 2020), 3) **Aspek akses ke pendidikan** atau *Acces to Education* (Cogentino , Fortson, Liuzzi , Harris, & Blair, 2019), 4) **Aspek hubungan internasional** atau *China –Tanzania Coorporation* (Makundi, Huyse, Develere , & Mongula , 2017), 5) **Aspek Sistim Informasi Manajemen pendukung keputusan penerimaan beasiswa** (Calvi, Casella, 2013)(Kirom, Bilfaqih, Effendie, 2012),

6) **Aspek pengaruh pemberian beasiswa terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa** (Varpahovskis et al., 2020) (Utomo, 2011), 7) **Aspek pengajuan beasiswa berbasis Web** (Sulis, Nurhadi, 2018). Dari kedua alasan di atas topic penelitian ini mempunyai kebaruan dibanding penelitian sejenis yang pernah dilakukan.